

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Aknar, Hikmatul, 2017, *Konversi Anti Korupsi PBB, Upaya Pengembalian Aset Hasil Korupsi ke Indonesia*, Makalah Seminar Pemberantasan Korupsi.
- Alldrige, Peter, 2001, *The Moral Limit of The Crime of Money Laundering*, University of California Press, California.
- Arysyad, H. Jawade Hafidz, 2013, *Korupsi Dalam Perspektif HAN*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Asikin, Zainal dkk, 2016, *Pengantar Hukum Perusahaan*, Prenada Media Group, Jakarta
- Atmadja, Arifin P. Soeria, 1986, *Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Negara*, Jakarta: Gramedia.
- Azheri, Busyra, 2011, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandatory*, Raja Grafindo Pers, Jakarta.
- Effendi, Tolib, 2013, *Sistem Peradilan Pidana Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, Pustaka Yutisia, Surabaya.
- Fajar, Muchti dan Yulianto, 2009, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, hlm. 320.
- Fuady, Munir, 2000, *Perbuatan Melawan Hukum*, Cetakan I, Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Fuady, Munir, 2002, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Gill, James O., 2006, *Dasar-Dasar Analisis Keuangan Informasi Keuangan Untuk Semua Manajer*, Jakarta: PPM.
- H.R., Ridwan, 2002, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta.
- Hakim, Abdul Aziz, 2011, *Negara hukum dan Demokrasi di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Hamzah, Andi, 2005, *Kamus Hukum*, Ghalia: Indonesia, Bogor.
- Hanafi, Mamduh M., dan Abdul Halim, 2003, *Analisis Laporan Keuangan*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Harita, Donny Christian, 2020, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Pembangunan*, JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum.
- Hartanti, Evi, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Herimulyanto, Agustinus, 2019, *Sita Berbasis Nilai Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- HS Salim dan Erlies Septiani Nurbani, 2017, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Husein, Yunus, *Penjelasan Hukum tentang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) dan Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan (Puslitbangkumdil) Mahkamah Agung, Jakarta

Karjadi, M. dan R. Soesilo, 1998, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, Politeia, Bogor.

Kartono, Kartini, 2003, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Kelsen, Hans, 2008, *Teori Hukum Murni*, Nusamedia, Bandung.

Khairrunisa, 2008, *Kedudukan, Peran dan Tanggungjawab Hukum Direksi*, Medan.

Klitgaard, Robert, 2001, *Membasmi Korupsi, Yayasan Obor Indonesia*, Jakarta.

Kristiana, Yudi, 2006, *Independensi Kejaksaan dalam Penyidikan Korupsi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Lamintang, P.A.F dan Theo Lamintang. 2009. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Jabatan dan Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Levi, Michael, 2017, *Tracing and Recovering The Proceeds of Crime*, Cardiff University, Wales, UK, Tbilis, Georgia.

M. Faal, 1991, *Penyaringan Perkara Pidana oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Martani, Dwi, 2012, *Akutansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK Buku 1*, Jakarta: Salemba Empat.

Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenada Media Group, Jakarta.

Muhammad, Abdulkadir, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti.

Notoatmojo, Soekidjo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta.

Purbacaraka, 2010, *Perihal Kaedah Hukum*, Citra Aditya, Bandung.

Purnama, Eddy, 2017, *Negara Kedaulatan Rakyat, Analisis Terhadap Sistem Pemerintahan Indonesia dan Perbandingannya dengan Negara-Negara Lain*, Nusamedia, Bandung.

Rahardjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti; Bandung

Renggong, Ruslan, 2016, *Hukum Pidana khusus, Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, Prenanda Group, Jakarta.

Romantz, David Scott, *Civil Forfeiture and The Constitution: A Legislative Abrogation of Right and The Judicial Response: The Guilt of the Res.* Suffolk University Law Review, 1994.

Simorangkir, J. C. T. dkk, 2010, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 2015, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.

Sumardjono, Maria SW., 2014, *Bahan Kuliah Metodologi Ilmu Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Toegarisman, Adi, 2007, “Pengarahan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan RI dalam Rapat Kerja Kejaksaan RI Tahun 2007 Tanggal 12-15 Desember 2017”, Jakarta.

Topan, Adnan, 2018, *Integritas Calon Pimpinan KPK, dalam Setengah Hati*

Memberantas Korupsi, Intras Publishing, Malang.

Triwulan, Titik dan Shinta, 2010 *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Prestasi

Pustaka, Jakarta.

Widyopramono, 2014, *Peran Kejaksaan Terhadap Asset Recovery Dalam*

Perkara Tindak Pidana Korupsi, Yogyakarta, Kerjasama MAHUPIKI

dan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Wiyono, R., 2005, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak*

Pidana Korupsi, Jakarta.

B. KARYA ILMIAH

Bureni, Imelda F.K, “Kekosongan Hukum Perampasan Aset Tanpa

Pemidanaan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi”. *Jurnal*

Masalah-Masalah Hukum, Jilid 45, No. 4, Oktober 2016.

Ginarsih Yenti, “Aset Recovery Act sebagai Strategi dalam Pengembalian Aset

Hasil Korupsi, dalam Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana”. *Jurnal*

Legislasi Indonesia, Vol. 7, No. 4, Desember 2010.

Harahap, Chairuman, “Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi

Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam

Sistem Hukum Pidana Indonesia”, *Disertasi*, Program Doktorat

Universitas Padjajaran, Bandung.

Porajow, David Fredrick Albert, 2013, “Non-Conviction Based Asset

Forfeiture sebagai Alternatif Memperoleh Kembali Kekayaan Negara

yang Hilang Karena Tindak Pidana yang Berkaitan dengan

Perekonomian Negara”. *Tesis*, Program Pascasarjana Magister Hukum Kekhususan Praktik Peradilan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Reksodiputro, Mardjono, “Beberapa Catatan Singkat tentang "Pembuktian Terbalik Dikaitkan dengan Perampasan Aset dalam Kasus Delik Pencucian Uang (Suatu Usaha Memberi Catatan Teoretis Untuk Keperluan Praktik”. *Makalah*, Seminar Nasional Pencucian Uang, FHUI-PPATK, Jakarta, 19 Juli 2011.

Saputra, Refki, Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia, *Integritas Jurnal Anti Korupsi*, Nomor 1, Maret 2017.

Sitompul, Hotma P.D., “Pelaksanaan *Asset Recovery* Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Pidana dan Hukum Perdata Indonesia”, *Disertasi*, Program Doktorat Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Sudarto dan Hari Purwadi, “Mekanisme Perampasan Aset dengan Menggunakan Non-Conviction Based Asset Forfeiture sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi”. *Jurnal Pascasarjana Hukum UNS*, Vol. V, No. 1, Januari-Juni 2017.

Wiarti, July, “Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Langkah Awal untuk Mengembalikan Kerugian Negara (Perspektif Analisis Ekonomi Terhadap Hukum)”, *UIR Law Review*, No. 1, April 2017.

Yussuf, Muhammad, “Kebijakan Hukum Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, *Disertasi*, Program Doktorat Universitas Padjajaran, Bandung.

C. PERATURAN

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-027/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017.

D. INTERNET

Asshiddique, Jimly, “*Penegakkan Hukum*”, <http://www.jimly.com/makalah/>
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pengembalian>, diakses pada tanggal 1 Mei 2021.

Jan Hoesada, Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
<https://www.ksap.org/sap/strategi-nasional-pencegahan-dan-pemberantasan-korupsi/>

Putra, Nanda Narendra, Non-Conviction Based Asset Forfeiture untuk Buru Pelaku Investasi Ilegal, melalui
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59251bbd52796/inon-conviction-basedasset-forfeiture-i-untuk-buru-aset-pelaku-investasi-ilegal>